TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DI LOKASI LIOMBE DESA PINANG JATUS KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Magister Administrasi Publik

Disusun Oleh :

HERIDA ERHAN

NIM. 530037134

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2023

ABSTRACT

EMPOWERMENT PROGRAM IMPLEMENTATION REMOTE INDIGENOUS COMMUNITIES (KAT) AT LOCATION OF LIOMBE, PINANG JATUS VILLAGE LONG KALI DISTRICT, PASER DISTRICT

Herida Erhan
Heridaerhan28@gmail.com
Graduate program
open University

Based on data from the Paser Regency Social Service, there were 56 families belonging to remote indigenous communities (KAT) who had been fostered or settled in the Liombe location, Pinang Jatus Village, where the funding came from the APBN, whose development activities were carried out by the East Kalimantan Provincial Social Service for 2018. The empowerment program remote indigenous community (KAT) Liombe Pinang Jatus Village, Long Kali District, Paser Regency is located in a location that is still remote and difficult to reach so that their lives do not meet a decent standard of living. In order to avoid gaps in social life, it still needs to be empowered, so that it is able to adapt to an ever-evolving environment.

This study uses a qualitative descriptive methodology. The data collection procedure was carried out using in-depth interview techniques, observation and documentation which were then analyzed using an interactive analysis model through the stages of data collection, data reduction, data presentation and data conclusion.

The results of the research show that the implementation of the remote indigenous community empowerment program (KAT) at Liombe Location, Pinang Jatus Village, Long Kali District, Paser Regency in 2018 and 2019 went well, because many empowerment programs were carried out by the government for the community. They really feel the impact given, such as cultivating peanuts, corn and chilies as well as processing forest products, namely rattan. This has an impact on welfare, economic empowerment and social activity including in their politics. The inhibiting factors are limited health and educational facilities, no lighting facilities, limited access to roads and clean water.

Keywords: *Implementation, Empowerment, KAT*

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DI LOKASI LIOMBE DESA PINANG JATUS KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER

Herida Erhan
Heridaerhan28@gmail.com
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Paser terdapat sebanyak 56 KK warga komunitas adat terpencil (KAT) yang telah dibina atau dimukimkan di lokasi Liombe Desa Pinang Jatus dimana pendanaannya berasal dari APBN yang kegiatan pembangunannya dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggarn 2018. Program pemberdayaan warga komunitas adat terpencil (KAT) Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser terletak di lokasi yang masih terpencil dan sulit untuk dijangkau sehingga kehidupannya kurang memenuhi standar hidup yang layak. Agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat maka masih perlu diberdayakan, sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus berkembang.

Penelitian ini menggunakan metodelogi deskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) di Lokasi Liombe Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser pada Tahun 2018 dan 2019 berjalan dengan baik, karena banyak program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Mereka sangat merasakan dampak yang diberikan seperti bercocok tanam kacang tanah, jagung dan cabai serta dalam hal pengolahan hasil hutan yaitu rotan. Hal ini berdampak pada kesejahteraan, keberdayaan ekonomi dan kegaitan sosial termasuk dalam politik mereka. Faktor yang menghambat adalah terbatasnya sarana fasilitas kesehatan, pendidikan, tidak adanya sarana penerangan, keterbatasan akses jalan dan air bersih.

Kata kunci: *Implementasi, Pemberdayaan, KAT.*

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DI LOKASI LIOMBE DESA PINANG JATUS KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER**"
adalah hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan
(plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tana Paser, 14 Februari 2023
Yang Menyatakan,



HERIDA ERHAN
NIM. 530037134

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama	:	Herida Erhan
NIM	:	530037134
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik (MAP)
Judul TAPM	:	Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Lokasi Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis/ 19 Januari 2023
Waktu	:	09.30 - 11.00 WITA

dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Tanda Tangan

Ketua Komisi Penguji
Nama : Dr. Hj. Rulinawaty, S.Sos., M.Si. .....

Penguji Ahli
Nama : Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. .....

Pembimbing I
Nama : Prof. Dr. Syahrumsyah Asri, SH., M.Si., APU. .....

Pembimbing II
Nama : Dr. Agus Santosa, MM. .....

PERSETUJUAN TAPM
PASCA UJIAN SIDANG

Judul TAPM	:	Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Lokasi Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser
Penyusun TAPM	:	Herida Erhan
NIM	:	530037134
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik (MAP)
Hari/Tanggal	:	Kamis/ 19 Januari 2023

Menyetujui

Pembimbing II,

Dr. Agus Santosa, MM.
NIP. 95808181986031005

Pembimbing I,

Prof. Dr. Syahrumsyah Asri, SH., M.Si., APU.
NIP. 19540511950301003

Penguji Ahli

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan Politik dan Mengelola Program Magister Administrasi Publik pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik

Dr. Hj. Rulinawaty, S.Sos., M.Si.
NIP. 197803242001122002

Dekan Fakultas Hukum,
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Muhammad Husni Arifin, S.Ag., M.Si., Ph.D.
NIP. 197708282005011002

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James E. (1975). Public Policy Making. New York: Holt, Renehart and Wins.

Arikunto, Suharsimi (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Rineka Cipta.

Ariningrum, Ratih. Edi, Noor. Sukoco, Widya. Studi Kualitatif Pelayanan Kesehatan Untuk Kelompok Adat Terpencil (Kat) Di Kabupaten Kepulauan Mentawai(A Qualitative Study on Health Services for Remote Etnics in Mentawai Islands District) Link :https://media.neliti.com/media/publications/21349 ID-studi-kualitatif-pelayanan-kesehatan-untuk-kelompok-adat-terpencil-kat-di-kabupa.pdf

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2008. Laporan Akhir, Kajian Pengembangan Kelembagaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kalimantan Timur. Samarinda.

Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.. 2015. Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Sosial Bagi Peserta Program Keluarga Harapan Melalui Kelompok Usaha Bersama. Jakarta : P3KS Press.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2006. Manajemen Kelembagaan Pusat Pembelajaran Masyarakat Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.

Bambang Rudito dan Melia Famiola. (2005). CSR ; Corporate Social Responsibility, Bandung penerbit Rekayasa Sains

Depdiknas. 2009. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu. Jakarta : Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas.

Dunn N., William, (1981). Public Policy Analysis: An Introduction, Englewood, N.J., Prentice Hall, Inc.

Dye, Thomas R. (1995). Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall. Edward III, 1980. Implementation Public Policy. Washington DC : Congresional Quarter Press.

Dye, Thomas R. (1975). Understanding Public Policy, Englewood, N.J., Prentice Hall. Inc.

Easton, David. (1953). The Political System, New York, Knopf. Eyestone, Robert. (1971). Threads of Public Policy Leadership, Indianapolis, Bobs-Merril.

Fattah, Nanang. (2004). Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan, Bandung : PT Remaja Rosdkarya.

Ferika. Akhyar (2015). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Oleh Dinas Sosial Di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2014 Link : https://media.neliti.com/media/publications/32464-ID-pelaksanaan program-pemberdayaan-komunitas-adat-terpencil-oleh-dinas-sosial-di-d.pdf.

Kurniawan, Edwin. Kusuma, Aji Ratna. Idris, Adam.Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Lokasi Sekulit Desa Munggu Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Link http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/577/527

Grindle Merilee S. Despite the Odds: The Contentious Politics of Education Reform . Princeton University Press.

Hehahia L Pieter, Farlin Sujanto. (2008). Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Tangerang: Scientific Press.

Jalal, F. dan Supriadi, D.(Eds). (2001). Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.

Jayaputra, Achmadi. (2012). Arah Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pulau Morotai. Jakarta: UMJ Press.

Keputusan presiden RI No. 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial KAT.

Keputusan Direktorat Jendral Pemberda yaanSosial Departemen Sosial RI Nomor.020/A/KPTS/VI/2002 Tentang Penunjukan Pemberdayaan KAT.

Keputusan Menteri Sosial RI No. 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Keputusan Bupati Paser No. 411.2/KEP-723/2019 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Paser.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020.

Siagian sondang P. (2005) Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT Bumi Aksara Soegito. (1999). Pembinaan Masyarakat Terasing. Jakarta: Departemen sosial RI.

Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Sugiono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabeta.

Sujianto. (2008). Iplementasi Kebijakan Publik Konsep dan Praktik. Pekanbaru; Alaf Riau.

Sujarwani, Wulandari. Fitri Dewi, Husni. Alfi, Rianto. Faizal, Sarinah (2018). Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau Lnk: http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantr.

Sunggono, Bambang. (2003). Kebijakan Hukum. Jakarta; Raja Grafindo Persada. Thoha Miftha (2003). Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta PT Grafindo Persada.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang republik indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

Wahab, Solichin Abdul. (1989). Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Malang, Rineka Cipta.

Winarno, Budi. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta; Media Pressindo.

Winarno, Budi.Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta; Media Pressindo.

Yulinawati (2017) Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT Di Desa Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Link https://www.neliti.com/publications/187908/program-pemberdayaan-komunitas-adat-terpencil-kat-di-desa-sungai-tohor-barat-kec